

Tantangan Pemberian Bantuan Luar Negeri Indonesia ke Pasifik Berdasarkan Model Birokrasi Politik

Andi Sintia

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia

Alamat: Ring Road Siliwangi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284

Korespondensi penulis: andisintia28@gmail.com

Abstract. *This article explains the challenges faced by Indonesia in providing foreign aid to the Pacific region. The background of the research shows that Indonesia has a strong commitment to contribute to sustainable development in Pacific countries, but the implementation of aid programmes still faces various obstacles, such as a lack of inter-agency coordination and a non-integrated approach. The purpose of this research is to analyse the effectiveness of Indonesia's foreign aid policy using the Political Bureaucracy Model. The method used is a descriptive qualitative approach, which involves literature review and in-depth interviews with relevant stakeholders. The results found that the main challenges include clarity of objectives, lack of strategic approach, and limited funding. It can be concluded that there is a need to develop a long-term strategy and improve inter-agency coordination to optimise the implementation of foreign aid programs, so that Indonesia can be more effective in achieving national goals and supporting Pacific countries.*

Keywords: *Aid, Bureaucracy, Indonesia, Abroad, Challenges*

Abstrak. Artikel ini menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam memberikan bantuan luar negeri ke kawasan Pasifik. Latar belakang penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di negara-negara Pasifik, namun implementasi program bantuan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan pendekatan yang tidak terintegrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan bantuan luar negeri Indonesia menggunakan Model Birokrasi Politik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang melibatkan studi literatur dan wawancara mendalam dengan *stakeholders* terkait. Hasil penelitian mendapatkan terdapat tantangan utama meliputi kejelasan tujuan, pendekatan strategis yang kurang, dan keterbatasan pendanaan. Dapat disimpulkan bahwa perlunya pengembangan strategi jangka panjang serta peningkatan koordinasi antar lembaga untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bantuan luar negeri, sehingga Indonesia dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan nasional dan mendukung negara-negara Pasifik.

Kata kunci: Bantuan, Birokrasi, Indonesia, Luar-Negeri, Tantangan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia berperan aktif dalam kerangka pemberian bantuan luar negeri ke Pasifik melalui Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Langkah bantuan luar negeri ke Pasifik ini diambil sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UUD 1945 dan cita-cita Indonesia untuk meningkatkan perannya di kancah politik global (Iswardhana 2020). Selain itu, Indonesia sebagai salah satu negara pemrakarsa penyelenggaraan Konferensi Asia Pasifik 1955 terikat dengan amanat konstitusi untuk saling memberikan dukungan bagi kemajuan bersama negara-negara berkembang (Iswardhana 2021b). Sebagaimana tertuang dalam salah satu misi bantuan luar negeri ke Pasifik, yaitu untuk saling memberikan dukungan dan memfasilitasi kemajuan antar negara berkembang.

Alasan-alasan tersebut menempatkan Indonesia untuk memberikan dukungan secara komprehensif terhadap proses pembangunan berkelanjutan (Rizky et al. 2021), termasuk

Received: September 10, 2024; September: Juli 20, 2024; Accepted: September 29, 2024;

Published: September 30, 2024;

melalui program-program bantuan luar negeri yang dilaksanakan di negara-negara Pasifik. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap kerangka kerja pemberian bantuan ditunjukkan dengan sumber daya keuangan yang cukup besar yang dialokasikan untuk program ini. Sejak tahun 2006, Indonesia telah memberikan kontribusi sebesar 49,8 juta USD untuk mendukung lebih dari 700 program, dengan fokus utama di kawasan Pasifik (Iswardhana, Winanti, and Nurhayati 2023). Pada periode antara tahun 2006 dan 2015, Indonesia telah mengimplementasikan 93 program peningkatan kapasitas, yang melibatkan total 680 peserta (Iswardhana, Winanti, and Nurhayati 2022).

Namun, implementasi bantuan luar negeri Indonesia ke Pasifik belum memaksimalkan peran yang seharusnya. Hal ini dikarenakan bantuan yang diberikan cenderung bersifat spontanitas. Selain itu, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan program bantuan luar negeri Indonesia, khususnya di kawasan Pasifik. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, “bagaimana tantangan dan efektivitas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di Pasifik?”.

2. KAJIAN TEORITIS

Model Birokrasi Politik

Model ini menggarisbawahi fakta bahwa proses pengambilan keputusan tidak dilakukan oleh pemerintah secara terpisah, melainkan melibatkan partisipasi dari berbagai aktor. Secara khusus, setiap keputusan kebijakan akan melibatkan berbagai aktor, termasuk kelompok dan individu, yang akan memiliki kepentingan terhadap hasilnya. Hal ini akan melibatkan proses tarik-menarik, tawar-menawar, dan saling mempengaruhi di antara para aktor tersebut. Keputusan yang kemudian akan diambil dipandang sebagai konsekuensi politik yang telah melalui proses musyawarah yang panjang dan rumit (Toma and Gorman 1991).

Namun, tidak jarang para aktor terlibat dalam bentuk interaksi yang kompetitif di dalam model ini. Setiap aktor yang terlibat akan berlomba-lomba memajukan lembaganya masing-masing, terutama dalam berbagai bentuk kebijakan yang akan menentukan arah pendanaan. Hal ini disebabkan karena dalam model ini, para pembuat kebijakan tidak akan sepenuhnya memperhitungkan konsekuensi, melainkan lebih melihat seperti apa kebijakan yang dihasilkan dan menguntungkan mereka. Berdasarkan model ini, kebutuhan akan sumber daya dan solusi yang dapat meningkatkan tingkat kepentingan dapat dipertimbangkan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tinjauan literatur sebagai metode utama. Pendekatan kualitatif ini dipilih untuk mendapatkan wawasan tentang pokok bahasan yang dimaksud. Dengan menggunakan metode deskriptif, peneliti dapat memberikan penjelasan yang lebih luas dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti (Nugrahani 2014). Pendekatan kualitatif ini dipilih untuk mendapatkan wawasan tentang pokok bahasan yang dimaksud. Dengan menggunakan metode deskriptif, peneliti dapat memberikan penjelasan yang lebih luas dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti (Nugrahani 2014). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bantuan luar negeri Indonesia, khususnya dalam konteks pemberian bantuan kepada negara-negara Pasifik, data dikumpulkan melalui analisis berbagai dokumen, jurnal, laporan tahunan, dan sumber-sumber daring yang melibatkan berbagai pihak terkait (Abdussamad 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan Luar Negeri Indonesia

Indonesia memiliki komitmen yang sudah lama untuk memberikan bantuan luar negeri kepada Pasifik. Namun, kurangnya sentralisasi dalam program ini telah mengakibatkan kurangnya koordinasi dan koherensi dalam bantuan yang diberikan (Chotimah, Iswardhana, and Pratiwi 2019). Setiap kementerian dan lembaga telah mengimplementasikan program bantuan luar negeri secara independen, yang menyebabkan ketidakselarasan dan tumpang tindih dalam inisiatif tersebut. Hal ini menyulitkan upaya untuk menjamin aktualisasi langkah-langkah kebijakan luar negeri Indonesia dan menilai dampaknya secara akurat (Iswardhana 2021a).

Indonesia menggunakan pendekatan strategis dalam pengorganisasian program, dimana setiap negara yang membutuhkan bantuan diperlakukan secara terpisah (Iswardhana 2022). Sistem yang digunakan oleh Indonesia konsisten dengan norma-norma yang telah ditetapkan yang mengatur pemberian bantuan. Prinsip solidaritas negara berkembang yang didasarkan pada unsur sukarela merupakan aspek yang melekat pada sistem ini (Iswardhana, Zakinah, et al. 2023). Implementasi bantuan luar negeri ke Pasifik dapat tercapai secara optimal dengan memfasilitasi kepentingan nasional negara pemberi bantuan. Untuk menggambarkan implementasi pemberian bantuan Indonesia, dapat dilihat pada dua periode, yaitu sebelum tahun 2010 dan sesudahnya.

a. Sebelum Tahun 2010

Sebelum tahun 2010, pelaksanaan bantuan luar negeri ke Pasifik dilakukan secara *ad hoc*, dengan masing-masing kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan bantuan Indonesia. Di Kementerian Luar Negeri, Direktorat Kerja Sama Teknik bertanggung jawab atas pengelolaan program-program bantuan luar negeri. Direktorat ini menerima permintaan bantuan pembangunan dari negara-negara yang telah menyelesaikan proses pendaftaran online di situs web lembaga tersebut. Tahap selanjutnya adalah seleksi permintaan yang telah diterima, yang kemudian ditentukan oleh prioritas program yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini, Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait untuk mengidentifikasi kapasitas dan kapabilitas nasional di sektor-sektor yang relevan (BPPK Kemlu RI 2016).

Untuk menentukan program prioritas, sejumlah faktor dipertimbangkan, termasuk komitmen politik dari Presiden atau pejabat tinggi negara, ketersediaan anggaran, dan kapasitas untuk bantuan teknis. Setelah program prioritas ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Kementerian Luar Negeri kemudian berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pelaksana yang direkomendasikan oleh kementerian teknis di sektor-sektor terkait untuk mengimplementasikan program-program yang telah disepakati (Iswardhana and Attamimi 2023).

Belum adanya indikator yang jelas mengenai sasaran yang dituju maupun tidak adanya database kerjasama teknis yang terintegrasi, yang akan memudahkan koordinasi antar instansi terkait. Ketiga, kurangnya tinjauan terhadap pelaksanaan dan manfaat dari bantuan yang diberikan, yang menghambat proses evaluasi. Terakhir, adanya keterbatasan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Setelah Tahun 2010

Tahun 2010 menandai momen penting dalam implementasi bantuan luar negeri ke Pasifik di Indonesia, yang dibuktikan dengan setidaknya dua pencapaian penting. Bantuan luar negeri dimasukkan ke dalam kebijakan luar negeri Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam RPJMN 2010-2014. Kedua, Tim Koordinasi Nasional untuk Pengembangan Kerja Sama Selatan-Selatan telah dibentuk, menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk mempromosikan kerja sama Selatan-Selatan.

Di bawah kepresidenan Joko Widodo, prioritas kebijakan luar negeri Indonesia telah mengalami pergeseran yang signifikan. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri untuk periode 2011-2014 mengidentifikasi pengembangan kebijakan

bantuan sebagai prioritas, dengan fokus pada pembentukan struktur kelembagaan, penguatan mekanisme pendanaan, dan peningkatan kerangka kerja sama program. Selain itu, terdapat komitmen untuk mengembangkan manajemen pengetahuan dan sistem informasi. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan peningkatan visibilitas implementasi ESG, yang mencakup promosi, pemantauan dan evaluasi (BAPPENAS 2014).

Selain itu, perkembangan ekonomi negara-negara Pasifik di bidang infrastruktur merupakan jalan yang menjanjikan untuk berkolaborasi, mengingat perusahaan konstruksi Indonesia memiliki kapasitas dan pengalaman yang dibutuhkan dalam membangun infrastruktur di berbagai negara Asia dan Pasifik. Dapat dipahami bahwa kawasan Pasifik sedang mengalami perkembangan yang signifikan, dengan sejumlah masalah mendesak yang dihadapi negara-negara Pasifik. Hal ini termasuk kerawanan pangan, tingkat kesehatan yang buruk, kemiskinan, dan pendidikan yang tidak memadai bagi anak-anak (Iswardhana 2023). Tantangan-tantangan ini sangat penting dalam perumusan bantuan luar negeri Indonesia di kawasan Pasifik. Selain itu, implementasi bantuan luar negeri harus mempertimbangkan potensi signifikan yang dimiliki oleh negara-negara Pasifik, terutama dalam hal sumber daya alam, termasuk minyak dan gas, dalam mencapai ketahanan energi (BPPK Kemlu RI 2015).

Tantangan Pemberian Bantuan Luar Negeri

Indonesia bukanlah negara yang mengejar kemajuan secara terpisah, melainkan mempertimbangkan kemajuan negara lain dalam merumuskan strategi pembangunannya. Namun, Indonesia menghadapi tantangan ketika berusaha mengoptimalkan program-program bantuan luar negeri. Pada kenyataannya, implementasi kebijakan bantuan Indonesia ke Pasifik, masih menghadapi berbagai tantangan.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi bantuan luar negeri di Pasifik adalah kurangnya kejelasan mengenai tujuan dan motivasi Indonesia terkait dengan tujuan sebenarnya dari pelaksanaan program bantuan. Indonesia masih dalam proses transisi dari negara penerima bantuan asing menjadi negara pemberi bantuan. Lalu, belum adanya pendekatan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program bantuan luar negeri (Ilyas et al. 2024). Dapat terlihat bahwa tujuan Indonesia melalui bantuan luar negeri tidak dapat digambarkan dengan jelas, dan ada kelangkaan hasil yang berkelanjutan (Ridha Iswardhana, Toko Arisanto, and Chotimah 2023). Berikutnya, masalah pendanaan yang masih terbatas untuk pemberian bantuan luar negeri. Ketersediaan anggaran negara yang terbatas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap program bantuan Indonesia (Ridha

Iswardhana et al. 2023). Namun, Indonesia tidak dapat terus bergantung pada lembaga/negara donor. Indonesia perlu mengembangkan strategi jangka panjang jika ingin menghilangkan ketergantungannya pada pihak luar, yang akan mempengaruhi implementasi bantuan luar negeri ke Pasifik untuk mencapai tujuan nasional.

Model Birokrasi Menjelaskan Bantuan Luar Negeri di Pasifik

Dalam mengkaji penentuan kebijakan melalui lensa model birokrasi politik, jelaslah bahwa peran berbagai aktor merupakan hal yang intrinsik dalam pembentukan suatu kebijakan. Teori ini menekankan pada posisi negara sebagai sebuah entitas yang memiliki banyak sisi, dan bukan sebagai aktor yang monolitik. Teori ini menyatakan bahwa keterlibatan pihak-pihak lain didorong oleh interaksi yang kompleks dari berbagai faktor. Keterlibatan aktor-aktor di luar pemerintah dimaksudkan untuk memperkuat implementasi kebijakan yang ada. Dalam pelaksanaan bantuan luar negeri Indonesia di Pasifik, pemerintah memegang kendali penuh. Tim Koordinasi Nasional KSST, yang terdiri dari BAPPENAS, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan program ini. Namun demikian, pelaksanaan program tetap didelegasikan kepada lembaga atau pihak swasta dan organisasi yang memiliki kompetensi untuk program yang direncanakan (Putri et al. 2023).

Keseluruhan pelaksanaan program bantuan luar negeri akan selalu menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang akan bertindak sebagai penghubung utama. Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab untuk mengidentifikasi berbagai elemen prioritas baik dari pihak penerima bantuan maupun kepentingan nasional Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga mematuhi prosedur operasional standar, yang sering diperbarui secara berkala untuk memfasilitasi evaluasi dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program.

Mengingat keterbatasan anggaran negara yang ada, Kementerian Luar Negeri akan menggunakan daftar tersebut sebagai daftar tunggu. Dalam hal ini, bantuan keuangan dari lembaga donor, baik negara maupun lembaga internasional, akan diarahkan ke negara penerima. Dengan cara ini, dana akan ditransfer langsung dari mitra ke negara penerima melalui Kementerian Luar Negeri, asalkan sesuai dengan kebutuhan atau program negara penerima. Jika negara penerima setuju untuk menerima bantuan dari pihak ketiga atau mitra, Kementerian Luar Negeri kemudian akan memprosesnya sebagai kerangka kerja untuk kerja sama segitiga (Shafiah F. Muhibat, Rizal Sukma, and Medelina K. Hendytio 2014).

Implementasi program bantuan oleh Indonesia dapat dievaluasi melalui penggunaan model birokrasi politik, yang menggambarkan partisipasi berbagai aktor non-negara.

Keberhasilan atau kegagalan program bantuan luar negeri Indonesia biasanya bergantung pada tingkat dukungan yang diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan. Namun demikian, meskipun Indonesia tampaknya mengandalkan skema triangular dalam pelaksanaan program bantuan luar negeri, tidak mungkin untuk menyamakan dan menilai Indonesia dengan menggunakan indikator konvensional (Iswardhana, Arisanto, et al. 2023). Jika mempertimbangkan skala bantuan yang diberikan oleh negara-negara donor tradisional seperti yang ditetapkan oleh Komite Bantuan Pembangunan. Kondisi ini bergantung pada status Indonesia sebagai negara berkembang, yang memiliki banyak kendala dalam pencairan pinjaman dan hibah. Mengevaluasi keberhasilan bantuan Indonesia memerlukan penilaian atas kontribusinya terhadap inisiatif pembangunan kapasitas yang selaras dengan pengalaman pembangunannya sendiri (Iswardhana 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini menganalisis tantangan dan efektivitas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam konteks pemberian bantuan luar negeri ke kawasan Pasifik. Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di negara-negara Pasifik melalui kerangka KSST. Namun, meskipun telah mengalokasikan sumber daya yang signifikan, implementasi program bantuan ini menghadapi berbagai kendala. Beberapa diantaranya kurangnya koordinasi antar lembaga, pendekatan yang tidak terintegrasi, dan keterbatasan pendanaan. Hal ini menghambat efektivitas bantuan yang disalurkan dan mengurangi dampak positif yang diharapkan bagi negara-negara penerima.

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan program bantuan luar negeri Indonesia adalah kurangnya kejelasan mengenai tujuan dan motivasi yang mendasari pelaksanaan program tersebut. Indonesia berada dalam proses transisi dari negara penerima bantuan asing menjadi negara pemberi bantuan, yang seharusnya mendorong sinergi antara inisiatif kerja sama pembangunan dan kepentingan nasional. Namun, pendekatan yang masih berbasis solidaritas menyebabkan kerangka kerja prioritas yang tidak memadai. Selain itu, kurangnya perencanaan strategis yang terintegrasi membuat kebijakan bantuan cenderung diimplementasikan secara ad hoc, sehingga hasil yang diharapkan tidak dapat dicapai secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyusun rencana strategis yang jelas dan terarah, yang akan menjadi dasar pelaksanaan program-program bantuan oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Dalam konteks efektivitas, meskipun Indonesia memiliki potensi dan komitmen yang tinggi dalam memberikan bantuan luar negeri, tantangan pendanaan yang dihadapi menjadi hambatan signifikan. Ketersediaan anggaran yang terbatas berdampak pada pelaksanaan program, termasuk biaya operasional yang diperlukan untuk Tim Koordinasi Nasional. Indonesia perlu mengembangkan strategi jangka panjang yang tidak hanya bergantung pada lembaga donor, tetapi juga mempertimbangkan potensi kerjasama yang lebih luas, termasuk kerangka kerja segitiga dengan negara-negara lain. Meningkatkan koordinasi antar lembaga dan memperkuat mekanisme pendanaan merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa bantuan luar negeri yang diberikan dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi negara-negara Pasifik. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan nasional dan mendukung pembangunan di kawasan tersebut, Indonesia harus beradaptasi dan mengatasi tantangan yang ada, sehingga peran dan kontribusinya sebagai negara pemberi bantuan dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Adi Wibawa, Muhammad Ridha Iswardhana, Maria Stephanie Olivia Jawa, Faisal Hasibuan, Annisa Rahmatin, Jescinka Priendisaputri, and Dian Inda Yani. 2024. “*Kegiatan Pengabdian Masyarakat Melalui Kampanye Lindungi Bumi: Berhenti Membuang Sampah Sembarangan Dan Mulailah Mendaur Ulang.*” *SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4(3):122–31. doi: 10.56910/safari.v4i3.1588.
- BAPPENAS. 2014. Laporan Kajian Bidang Kerjasama Pembangunan Internasional Dalam Rangka Penyusunan Draft RPJMN Tahun 2015-2019.
- BPPK Kemlu RI. 2015. Reorientasi Kerjasama Selatan-Selatan Dan Triangular Bagi Kepentingan Nasional. Jakarta.
- BPPK Kemlu RI. 2016. Kerjasama Selatan Selatan Sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Jakarta.
- Chotimah, Hidayat Chusnul, Muhammad Ridha Iswardhana, and Tiffany Setyo Pratiwi. 2019. “*Penerapan Military Confi Dence Building Measures Dalam Menjaga Ketahanan Nasional Indonesia Di Ruang Siber.*” *Jurnal Ketahanan Nasional* 25(3):331. doi: 10.22146/jkn.50344.
- Ilyas, Arifai, Iswardhana Muhammad Ridha, Lorina Siregar Sudjiman, and Sudjiman Eduard Paul. 2024. *Bisnis Internasional*. Solok: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Iswardhana, Muhammad Ridha, and Attina Maulidia Selma Attamimi. 2023. “*Efektivitas Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Bandung Barat Tahun 2019.*” . . JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) 6(2):109–20.

- Iswardhana, Muhammad Ridha, Maf'ulillahi Zakinah, Gita Ardyah Maharani, Widia Grace Tayan, and Adinia Nuraini. 2023. "*Kampanye Gunakan Hak Suara Dan Jangan Golput Pada Pemilu 2024 Untuk Generasi Muda.*" PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) 3(1).
- Iswardhana, Muhammad Ridha, Poppy Sulistyaning Winanti, and Ririn Tri Nurhayati. 2022. "*Promoting Education and Training as Efforts to Improve Human Resources in African Developing Countries.*" Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama 14(2):767–78.
- Iswardhana, Muhammad Ridha, Poppy Sulistyaning Winanti, and Ririn Tri Nurhayati. 2023. "*Rethinking Domestic Politics of Indonesian SSTC in Africa and Paradox of MRLs Education Training.*" JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) 9(4):268. doi: 10.29210/020233381.
- Iswardhana, Muhammad Ridha, Puguh Toko Arisanto, Hidayat Chusnul Chotimah, Adi Wibawa, Lucitani Risky, and Tiffany Setyo Pratiwi. 2023. "*SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK MENYONGSONG PEMILU 2024 TERHADAP GENERASI Z DI SMAN 4 YOGYAKARTA.*" Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin 2(1):6–10. doi: 10.56127/jammu.v2i1.574.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. 2020. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan: Merajut Kebinekaan Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. 2021a. "*Cyber Diplomacy And Protection Measures Against Threats Of Information Communication Technology In Indonesia.*" Journal of Islamic World and Politics 5(2):343–67. doi: 10.18196/jiwp.v5i2.12242.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. 2021b. "*Indonesia's South-South and Triangular Cooperation (SSTC) as the Future of Diplomacy for World Solidarity to Overcome the COVID-19 Pandemic.*" Global South Review 2(1):25. doi: 10.22146/globalsouth.62532.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. 2022. "*Geoekonomi Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB).*" DEFENDONESIA 6(1):1–24. doi: 10.54755/defendonesia.v6i1.112.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. 2023. "*Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dan Keadilan Sosial.*" Jurnal Kewarganegaraan 7(1):1081–88.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. 2024. "*The Indonesian Government Responds to Protecting the Natuna Area through the Utilization of National Security.*" The International Journal of Politics and Sociology Research (IJOPSOR) 12(2):147–56. doi: <https://doi.org/10.35335/ijopsor.v12i2.262>.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books.
- Putri, Mas, Randi Saputra, Muhammad Ridha Iswardhana, Emillia, Ranny Rastati, Agus Sugiharto, Agus Rendra, Muhammad Rachimoellah, Tsulis Amiruddin Zahri, Nofita Octaviany, and Putri Handayani Lubis. 2023. "*Kewarganegaraan: Teoretis Dan Praksis.*" (April 2024):1–233.

- Ridha Iswardhana, Muhammad, Puguh Toko Arisanto, and Hidayat Chusnul Chotimah. 2023. "Pengabdian Sosialiasi Meningkatkan Motivasi Nasionalisme Generasi Milenial." *Jurnal Pengabdian West Science* 02(08):734–39.
- Rizky, Lucitania, Tiffany Setyo Pratiwi, Hidayat Chusnul Chotimah, Muhammad Ridha Iswardhana, Adi Wibawa, and Puguh Toko Arisanto. 2021. "Budidaya Jamur Pada Ibu-Ibu Rumah Tanga Di Dusun Kruwet Untuk Mewujudkan SDGs 2030." *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(3):177–85. doi: 10.25008/altifani.v1i3.155.
- Shafiah F. Muhibat, Rizal Sukma, and Medelina K. Hendytio. 2014. *Studi Mengenai Implementasi Kebijakan Dan Strategi Kemitraan Pendanaan Kerja Sama Selatan-Selatan Dan Triangular*. Centre for Strategic and International Studies. Jakarta.
- Toma, P. A., and R. F. Gorman. 1991. *International Relations: Understanding Global Issues*. Brooks/Cole Publishing Company.